

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini ditulis untuk menjabarkan hal-hal yang mengawali penelitian ini. Dengan demikian bab ini akan berisi tujuh judul.

Judul pertama adalah Latar Belakang Masalah. Pada judul ini akan menjabarkan tentang konflik Yaman, keterlibatan Arab Saudi, dan penolakan Pakistan untuk membantu serangan udara Arab Saudi di Yaman.

Judul kedua adalah Rumusan Masalah. Judul ini berisi rumusan masalah yang ditarik dari penolakan Pakistan untuk membantu serangan udara Arab Saudi di Yaman.

Judul ketiga adalah Kerangka Berpikir. Judul ini berisi tentang teori yang saya gunakan beserta operasionalisasinya.

Judul keempat adalah Hipotesis. Disitu akan saya kemukakan hipotesis yang saya tarik dari operasionalisasi teori yang saya lakukan di judul kerangka berpikir.

Judul kelima adalah Metode Pengumpulan Data. Pada judul ini akan saya tulis bagaimana metode penulis dalam mengumpulkan data.

Judul keenam adalah Ruang Lingkup Penelitian. Disitu akan saya tulis batasan-batasan dari lingkup penelitian ini.

Judul ketujuh adalah Sistematika Penulisan. Disitu akan saya tulis bagaimana penulisan penelitian ini disusun.

A. Latar Belakang Masalah

Yaman merupakan sebuah negara berkembang yang sedang dilanda krisis politik sejak pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh. Saleh sudah memegang kekuasaan di Yaman selama 33 tahun. Pada Januari 2011, mengikuti revolusi Tunisia yang berhasil menggugurkan jabatan presiden Tunisia yang berlangsung selama 23 tahun lebih, serangkaian mulai demonstrasi bertebaran di ibu kota Yaman (Sana'a) menentang kemiskinan, pengangguran, dan rencana presiden Saleh untuk mengabadikan masa jabatannya. Setelah kericuhan berlangsung sampai akhir tahun, Saleh bersedia turun dari Jabatannya dan Jabatan presiden ini kemudian digantikan oleh Abd Rabbuh Mansur Hadi melalui pemilu pada 21 Februari 2012.

Tetapi meskipun pemerintahan Saleh berakhir, Yaman masih memiliki konflik dengan Houthi yang masih berlangsung sejak tahun 2004. Houthi merupakan kelompok religius yang bermazhab Zaidiyah yang merupakan salah satu mazhab Syi'ah. Mereka menempati Yaman Utara dan dikenal dengan kekasarannya, kehebatan menembaknya, kehormatannya, dan keberaniannya dalam bertempur. Tetapi atas hal ini pula mereka dianggap bodoh atau terbelakang oleh penduduk kota Yaman seperti Sana'a atau Aden. Penduduk kota ini dikenal sebagai Syiah yang lebih moderat dan dekat dengan Islam Sunni.¹

Ahmed Addaghasi, seorang profesor di Universitas Sanaa, mengatakan bahwa di awal 1990-an Houthi pada mulanya merupakan gerakan moderat yang menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Kelompok ini bermula dari perkumpulan "believing youth

¹ Freeman, Jack (2009). "The al Houthi Insurgency in the North of Yemen: An Analysis of the Shabab al Moumineen". *Studies in Conflict & Terrorism* 32 (11): 1008–1019

forum” di awal tahun 90-an. Namun perkumpulan ini terbagi secara internal menjadi dua jalur. Yang satu lebih terbuka dan sisanya lebih masih berpegang teguh dengan pemahaman tradisional Zaidiyah.²

Ironisnya, kata Addagashi, Hussein Bader Addian al-Houthi, pendiri kelompok yang berada di jalur pertama, melancarkan serangan bersenjata pada tahun 2004 dengan alasan pertahanan diri ketika berkonflik dengan pemerintahan Yaman.³

Addaghashi mengatakan bahwa ketegangan di antara pasukan keamanan Yaman dan Houthi bermula ketika pendukung kelompok ini melakukan aksi protes di mesjid-mesjid ibu kota. Hal ini kemudian dianggap oleh Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Saleh memerintahkan penahanan terhadap beberapa anggota kelompok mereka, dan memaksa pemimpin mereka Hussein al-Houthi untuk menghentikan aksi pendemo yang mengganggu para jamaah beribadah. “konflik bersenjata bermula ketika Saleh mengirimkan pasukan ke provinsi Saada untuk menangkap Hussein karena menolak untuk menghentikan aksi pendukungnya,” kata Addaghashi.⁴ Hussein al-Houthi kemudian terbunuh pada tahun 2004 setelah Saleh mengirimkan pasukan pemerintah ke Saada.

Aksi Pemberontakan kemudian berlanjut secara kecil-kecilan dan sampai perjanjian gencatan senjata pada 30 Januari 2010. Perjanjian ini dilakukan dengan harapan untuk menghentikan konflik bersenjata yang sudah berlangsung selama 6 tahun

² Batati, S. A. (2015, Maret 29). Who are the Houthis in Yemen? Dipetik Agustus 2015, 2015, dari AL Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html>

³ Ibid.

⁴ Ibid.

dan yang telah mulai merembes ke negara tetangga yakni Arab Saudi. Namun pada 31 Januari, pemerintahan Yaman menolak perjanjian tersebut dan melancarkan serangan baru dan 24 orang menjadi korban.⁵

Pada November 2011, Houthi menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih dua wilayah Yaman yakni Saada dan Al Jawf dan sudah hampir mengambil alih Hajjah.⁶ Dengan wilayah ini mereka akan dengan mudah melancarkan serangan langsung ke Ibu Kota Yaman (Sana'a). Pada Mei 2012, dilaporkan bahwa Houthi telah mengambil alih Saada, Al Jawf, dan Hajjah.⁷

Di sekitar tahun 2014 sampai 2015 Houthi berhasil mengambil alih ibu kota Sana'a. Pada 20 Januari 2015, Houthi mengambil alih istana presiden. Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi waktu itu sedang berada di dalam istana tetapi untungnya Hadi tidak terluka. Pada 6 Februari Houthi secara resmi telah mengambil alih pemerinthan Yaman. Parlemen pun dibubarkan dan Komite Revolusioner Houthi dinyatakan sebagai pihak yang berwenang di Yaman.

Setelah Presiden Hadi keluar dari Istana, Hadi pergi ke Aden di daerah Yaman selatan dan menyatakan Aden sebagai ibu kota sementara Yaman. Pada 25 Maret, Presiden Hadi meminta kepada dewan keamanan PBB untuk mengizinkan negara-negara yang bersedia untuk membantu Yaman secara langsung dengan cara apapun demi melindungi Yaman dan menahan agresi Houthi.

⁵ Ibid.

⁶ Islam Times. (2011, November 9). Houthis Close to Control Hajjah Governorate, Amid Expectations of Expansion of Control over Large Parts of Northern Yemen. Dipetik Agustus 23, 2015, dari Islam Times: <http://www.islamtimes.org/en/doc/news/112627/>

⁷ Fattah, K. (2012, Mei 11). Yemen's Sectarian Spring. Dipetik Agustus 23, 2015, dari Carnegie Endowment for International Peace: <http://carnegieendowment.org/sada/?fa=48095>

Menanggapi situasi ini pada bulan Maret, Koalisi Arab Saudi memutuskan untuk melakukan intervensi dalam melawan Houthi. Berdasarkan stasiun berita Saudi, Al Arabiya, Saudi mengirimkan 100 pesawat tempur dan 150.000 prajurit ke Yaman. Reuters juga menyebutkan bahwa pesawat dari Mesir, Maroko, Yordan, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain juga berpartisipasi dalam operasi ini. UEA berkontribusi 30 pesawat tempur, Kuwait mengirimkan 15, Bahrain mengirimkan 15, Qatar 10, Yordan dan Morocco masing-masing 6 dan Sudan 4.⁸

Dalam membentuk koalisi tersebut Arab Saudi mengajak Pakistan. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Pakistan. Arab Saudi mengaku sangat kecewa dengan hal ini. Duta besar Saudi sampai mengatakan “Bagaimana perasaan Pakistan jika kami melakukan hal yang sama kepada anda di waktu krisis?”.⁹

Karena melihat Saudi yang sangat kecewa ini, sebagai gantinya Pakistan memutuskan untuk membantu dengan embargo senjata. Rencananya Pakistan akan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut untuk menegakkan embargo yang akan melibatkan pemeriksaan kapal-kapal Yaman yang dicurigai membawa senjata untuk Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan pemimpin Yaman Ali Abdullah Saleh.^{10 11}

12

⁸ Al Jazeera. (2015, Maret 26). Saudi and Arab allies bomb Houthi positions in Yemen. Dipetik Agustus 23, 2015, dari Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/saudi-ambassador-announces-military-operation-yemen-150325234138956.html>

⁹ <http://www.firstpost.com/world/saudi-arabia-unhappy-pakistans-decision-stay-away-yemen-crisis-2220472.html> dipetik tanggal 20 Desember 2016

¹⁰ <http://www.dawn.com/news/1176700>

¹¹ <http://tribune.com.pk/story/871791/yemen-conflict-pakistan-moves-to-implement-un-resolution/>

¹² <http://en.dailypakistan.com.pk/pakistan/pakistan-agrees-to-deploy-navy-ships-near-yemen-us-think-tank/>

Saya pikir penolakan ini adalah hal yang menarik karena seharusnya Pakistan mau membantu serangan udara tersebut jika mengingat persahabatan di antara mereka. Mereka sebetulnya memiliki banyak catatan kerjasama yang utamanya di bidang militer. Bahkan mantan kepala intelijen Saudi, Pangeran Turki bin Sultan, mendeskripsikan tingkat kooperasi mereka sebagai salah satu hubungan antar dua negara yang paling dekat di dunia ini.¹³

Dalam bidang Angkatan Bersenjata, program kerjasama mereka di bidang ini dimulai pada tahun 1979. Pada Maret 1979, pemerintah Saudi meminta bantuan tenaga militer kepada Pakistan karena Saudi merasa terancam atas terjadinya Revolusi Iran 1979. Saudi takut akan munculnya semangat revolusi yang menentang monarki di negeri mereka. Jadi, sebuah Perjanjian Protokol ditandatangani pada 14 Desember 1982. Dengan begitu pada tahun 1970-1980an, sebanyak 15.000 tentara Pakistan ditempatkan di Arab Saudi Untuk mengamankan negara. Perjanjian Protokol 1982 tersebut kemudian diperluas lingkungannya agar meliputi kerjasama pelatihan militer, penyediaan teknologi dan sains pertahanan, dan produksi alat-alat pertahanan.¹⁴

Pada November 2009, tentara Pakistan yang meliputi tank, infantri dan altileri berangkat dari Bahawalpur (sebuah kota di provinsi Punjab) ke Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam sebuah latihan militer bersama “Al-Samsam-III” (Pedang Tajam) dengan Saudi Royal Land Forces (RSLF). Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan koodinasi di antara pasukan kedua negara. Sehingga kerjasama mereka

¹³ Riedel, B. (2008, Januari 28). Saudi Arabia: Nervously Watching Pakistan. Dipetik April 29, 2015, dari Brookings: <http://www.brookings.edu/research/opinions/2008/01/28-saudi-arabia-riedel>

¹⁴ Kamran, S. (2013, Januari). *Pak-Gulf Defense and Security Cooperation*. Dipetik April 29, 2015, dari Center For PAKistan and Gulf Studies: <http://cpakgulf.org/documents/Pak-Gulf-Security-Ties-final.pdf>

lebih efisien saat menghadapi berbagai masalah yang dianggap mengancam kedua negara.¹⁵

Latihan militer bersama selama tiga minggu (Al-Samsaam-IV-2011) antar Tentara Pakistan dan Royal Saudi Land Forces diadakan pada September-Oktober 2011. Tujuan dari Al-Samsaam-IV-2011 ini adalah untuk pembiasaan dan berbagi informasi melalui program latihan komprehensif di lapangan.¹⁶

Pakistan Aeronautical Complex, Heavy Industries Axial dan Institute of Industrial Control System berperan sangat besar dalam menyediakan alat-alat pertahanan untuk Arab Saudi. Pakistan Aeronautical Complex adalah sebuah perusahaan perakitan dan produksi alat-alat penerbangan Pakistan. Heavy Industries Axial adalah sebuah kontraktor pertahanan Pakistan. Institute of Industrial Control System adalah kompleks penelitian dan industri alat-alat pertahanan Pakistan.¹⁷

Dalam bidang angkatan udara, pilot Angkatan Udara Pakistan pernah menerbangkan pesawat Arab Saudi di perang Al-Wadiah yang meletus pada 27 November 1969. Waktu itu sebuah kota kecil yang bernama Al-Wadiah direbut oleh pasukan People of Republic South Yemen. Konflik tersebut kemudian berakhir pada 6 Desember.¹⁸

Saat Mantan Kepala Staff Angkatan Udara Pakistan, Rao Qamar Suleman, mengunjungi Arab Saudi secara pribadi pada 15 Desember 2010, Suleman menerbangkan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Al-Wadiah%20War&item_type=topic

pesawat tempur F-16 milik Pakistan saat Latihan Udara Gabungan Al-Saqoor-II. Latihan ini diadakan oleh kedua angkatan udara mereka dari Januari 2010. Kemudian Pakistan Aeronautical Complex menjual pesawat buatan mereka sendiri, yakni Karakorum-8 dan Super Mushak, kepada Arab Saudi.¹⁹

Di bidang Angkatan Laut, kedua negara berkerjasama menjamin keamanan Lautan Hindi. Duta Besar Pakistan untuk Arab Saudi yang bernama Muhammad Naeem Khan, dalam acara penyambutan kapal angkatan laut Pakistan PNS Zulfiqar, PNS SV Behr Paima dan PNS/Sub Marine Hamza yang datang ke Arab Saudi mengatakan bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Pakistan memiliki akar yang sangat dalam dan pemimpin Saudi “menganggap hubungan ini melebihi batas apa pun”. Ditambah lagi Naeem mengatakan bahwa setiap Orang Pakistan menganggap “keamanan Arab Saudi sebagai urusan pribadi saya.” Tidak cukup sampai disitu duta besar itu mengatakan lagi bahwa pemimpin kedua negara menganggap Arab Saudi dan Pakistan sebagai satu negara.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis putuskan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan:

Mengapa Pakistan memutuskan untuk menolak membantu Arab Saudi melakukan serangan udara terhadap pemberontak Houthi?

¹⁹ Kamran, S. Op.Cit.

²⁰ Ibid.

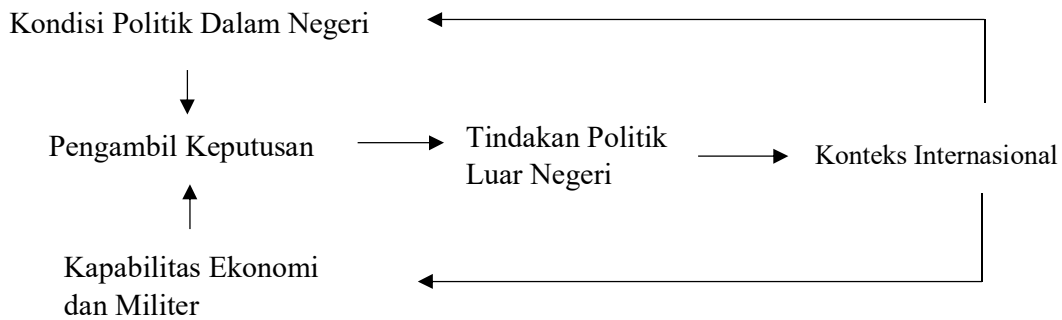
C. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan kerangka analisa politik luar negeri oleh William D. Coplin.

Coplin menyatakan tindakan politik luar negeri tertentu bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Tiga konsiderasi itu yakni: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional.²¹ Faktor-faktor tersebut berinteraksi seperti Gambar 1.

Gambar 1

Cara Empat Faktor Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tindakan politik luar negeri di putuskan oleh pengambil keputusan yang dipengaruhi oleh kemampuan politik dalam negeri dan kemampuan ekonomi dan militer yang juga dipengaruhi oleh konteks internasional.²²

²¹ Coplin, W. D. (2003). Pengantar Politik Internasional. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung. Hal. 165

²² Ibid. Hal. 30

a. Pengambil keputusan

Coplin mendeskripsikan para pengambil keputusan sebagai orang-orang yang dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu, bertanggung jawab kepada orang lain, ditekan oleh beragam kondisi, dan dipaksa untuk mengambil keputusan.

Coplin berpendapat bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri cenderung menyisihkan interpretasi-interpretasi baru tentang lingkungan, memilih dan bertindak menurut tujuan-tujuan tradisional, membatasi upaya pencarian alternatif dari sejumlah kecil alternatif yang moderat, dan akhirnya mengambil risiko yang kecil andaikata tidak berhasil. Meskipun Coplin menekankan bahwa ciri-ciri kepribadian dan gaya kepemimpinan tertentu dalam organisasi mungkin muncul dalam diri seorang pengambil keputusan yang membuat interpretasi-interpretasi yang sangat berbeda tentang lingkungan, yang menyeleksi tujuan-tujuan yang bersifat revolusioner, yang mengeksplorasi alternatif-alternatif yang belum pernah didengar sampai sekarang, dan yang mengambil risiko, pengambilan keputusan seperti itu adalah kekecualian, bukan hal yang umum.²³

b. Kondisi Politik Dalam Negeri

Peran politik dalam negeri dalam proses perumusan politik luar negeri ada pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin menyebut aktor-aktor tersebut dengan *policy influencers*. Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tadi dengan para pengambil keputusan disebut dengan “Policy

²³ Ibid. Hal. 63

influence system”. Hubungan di antara para pengambil keputusan dengan policy influencers tadi sangat dipengaruhi oleh sifat policy influence system (atau sistem politik) yang berlaku di negara bersangkutan.

Policy influencers yang dimaksud oleh Coplin ada 4 jenis yaitu bureaucratic influencers, partisan influencers, Intertest influencers, dan Mass influencers. Untuk sifat policy influence system ada dua jenis yaitu terbuka dan tertutup.

Berdasarkan sifat sistem politik pengaruh policy influencers terhadap para pengambil keputusan dapat dipahami sebagai berikut:

a. Bureaucratic Influencers

Bureaucratic influencers biasanya mempengaruhi para pengambil keputusan dengan memberikan informasi pada tahap perumusan dan bantuan administratif pada tahap pelaksanaan. Mereka jarang terbuka menentang kebijakan yang ada meskipun mereka mungkin berupaya kebijakan itu melalui keputusan-keputusan administratif pada tingkat rendah. Jadi dalam sistem tertutup atau terbuka, pengaruh mereka mereka sama saja.

b. Partisan influencers

Dalam sistem tertutup, partisan influencers, apa bila mereka ada dan tidak revolusioner, kadang-kadang memiliki kemampuan untuk menentukan kesinambungan jabatan pengambil keputusan, apabila disepakati oleh bureaucratic influencers. Demikian pula sebaliknya, mereka tidak memiliki kemampuan itu apabila tidak disepakati oleh bureaucratic influencers. Partisan influencers yang

revolusioner di negara yang menganut sistem politik tertutup tidak memiliki banyak pengaruh atas para pengambil keputusan.

Dalam sistem terbuka, partisan influencers memberikan porsi dukungan utama kepada rezim pemerintahan karena pentingnya pemilihan umum. Dalam sistem terbuka kemampuan partisan influencers untuk menekan para pengambil keputusan politik luar negeri dibatasi oleh kenyataan bahwa, lembaga eksekutif, biasanya merupakan pengambil inisiatif, dan tuntutan terhadap keamanan dan kerahasiaan sering membatasi oposisi.

c. Interest Influencers

Dalam sistem tertutup interest influencers beroperasi melalui partisan influencers dan bureaucratic influencers secara rahasia yang membuat peran mereka dalam menekan para pengambil keputusan politik luar negeri bersifat sekunder.

Dalam sistem terbuka, peran interest influencers cukup besar karena beberapa di antara mereka memiliki kemampuan finansial atau dukungan publik untuk mempengaruhi kemampuan partisan influencers dan para pengambil keputusan untuk memenangkan pemilihan umum.

d. Mass Influencers

Dalam sistem tertutup, iklim opini membawa beberapa dampak meskipun secara substansial iklim itu dibentuk oleh pengambil keputusan serta partisan influencers.

Dalam sistem terbuka, Mass influencers mampu memperoleh informasi yang sering menjadi dasar ketidaksepakatan terhadap para pengambil keputusan politik luar negeri meskipun yang belakangan ini pada masa-masa sebelumnya biasanya berhasil membentuk opini publik.

Citra juga sangat berperan dalam perilaku policy influencers

- Baik bureaucratic influencers maupun interest influencers, cenderung memiliki pandangan khusus tentang lingkungan internasional yang cukup rinci pada setiap bidang kepentingan mereka dan berpandangan sempit terhadap bidang-bidang lain.
- Partisan influencers cenderung memiliki citra yang lebih luas namun lebih beragam pada sistem terbuka ketimbang sistem tertutup.
- Mass influencers memiliki citra yang lebih luas tentang lingkungan internasional, namun pengetahuannya kurang mendalam.
- Para pengambil keputusan politik luar negeri cenderung memiliki citra yang berbeda, tentang lingkungan internasional, jika dibandingkan dengan policy influencers, tidak hanya karena perspektif mereka berbeda-beda, tetapi juga karena mereka menerima dan menyesuaikan diri dengan informasi yang lebih banyak ketimbang kebanyakan policy influencers, namun tidak semua policy influencers.

Tekanan policy influencers terhadap para pengambil keputusan politik luar negeri bisa dianalisis menurut empat macam bidang isu.

- Keamanan nasional sebagai suatu bidang isu, menarik minat keempat macam policy influencers, namun sedikit sekali tekanan yang diberikan (ke suatu arah tertentu) dengan tegas.
- Policy influencers menekan kebijakan ekonomi luar negeri dengan cara yang berbeda-beda.

- Orientasi ekonomi partikularis pada semua sistem politik dicapai oleh interest influencers dengan intensitas yang tinggi.
 - Orientasi ekonomi nasionalis pada semua sistem politik dicapai oleh bureaucratic influencers, mass influencers, dan pada taraf yang lebih rendah oleh partisan influencers, tetapi dengan intensitas yang moderat.
- Berbagai isu yang tidak secara langsung menyangkut keamanan nasional dan ekonomi, tetapi yang didasarkan atas kondisi-kondisi historis atau ideologis, sangat berperan dalam aktivitas policy influencers, baik pada tingkat nasionalis maupun pada tingkat partikularis.
 - Berbagai isu mengenai sarana politik luar negeri, dan bukan tujuannya, sering menjadi fokus perhatian mass dan partisan influencers.

Berdasarkan hal ini Coplin berpendapat bahwa perbedaan antara sistem politik terbuka dengan sistem politik tertutup, terletak pada strategi dan arti penting relatif keempat tipe policy influencers, dan bukan pada derajat koresponsifan para pemimpin terhadap rakyat secara langsung. Dalam sistem terbuka, pengambil keputusan politik luar negeri dipaksa untuk berargumentasi di depan umum tentang kebijakan-kebijakannya. Sedangkan pada sistem tertutup individu itu bisa mencapai konsensus bagi kebijakan-kebijakannya dibalik pintu tertutup.

c. Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Kapabilitas ekonomi dan militer berkaitan dengan tingkat kemampuan militer dan kapabilitas ekonomi negara. Dimensi ekonomi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri adalah kapasitas produksi ekonomi dan kebergantungan ekonomi pada

perdagangan dan finansial internasional. Kekuatan militer yang relevan bisa dilihat dari jumlah personal, tingkat pelatihan, perlengkapan angkatan bersenjata, tingkat dukungan luar negeri, dan peran angkatan bersenjatanya dalam memelihara stabilitas dalam negeri.

Namun saat membahas kondisi ekonomi dan militer, Coplin menemukan bahwa kita tidak bisa membahas kemampuan ekonomi dan militer hanya dengan memandang pada kuantitas. Negara-negara yang kurang unggul dalam bidang ekonomi dan militer, sering memiliki kemampuan imbalan dalam bidang lain.

Dewasa ini interdependensi ekonomi berlangsung dalam dua arah, sehingga walaupun satu negara mungkin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hubungan ekonominya daripada negara lain, kedua-duanya akan mengalami kesulitan apabila hubungan itu diputuskan. Hal ini menyebabkan kekuatan ekonomi merupakan alat terbatas bagi para penyusun politik luar negeri. Bersamaan dengan itu, kemampuan militer telah berubah, sehingga meskipun negara yang militernya kuat bisa lebih menghancurkan negara yang militernya lemah daripada sebaliknya, yang lemah juga bisa cukup merusak negara yang kuat, sehingga yang kuat itu enggan menggunakan kekerasan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus, di mana yang kuat berupaya menciptakan kontrol militernya terhadap kawasan lain yang memiliki kemampuan untuk melancarkan perlawanan gerilya. Jadi bahasan tadi seharusnya menunjukkan bahwa kondisi-kondisi ekonomi dan militer membawa dampak yang kompleks terhadap perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, dan bahwa keunggulan dalam kemampuan militer untuk menghancurkan dan keunggulan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan kemakmuran, tidak dengan sendirinya menjadi alat yang bisa digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mencapai tujuan mereka.

d. Konteks Internasional

Konteks Internasional menyangkut tiga hal: geografis, ekonomis, dan politis.²⁴ Elemen Geografis yang dimaksud adalah seperti proksimitas atau kedekatan geografis karena mempengaruhi bidang-bidang yang berkaitan dengan logistik militer, pola perdagangan, pola aliansi, keanggotaan dalam organisasi antar pemerintah, dan pola pemberian suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Elemen ekonomis yang dimaksud adalah seperti interdependensi ekonomi. Hal tersebut berperan dalam konteks internasional di latar belakang oleh adanya arus barang dan jasa maupun modal membuat negara-negara tertentu bergantung pada negara lain. Interdependensi ekonomi seperti itu menimbulkan dukungan serta tuntutan kepada pengambil keputusan politik luar negeri.

Elemen politis yang dimaksud adalah hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungan. Hal ini penting karena dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik luar negeri negara.

- Seperti halnya aliansi-aliansi yang bisa berdampak besar terhadap anggota-anggotanya dan bukan anggotanya, terutama apabila aliansi itu menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing.
- Kemampuan untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain dalam keadaan tertentu bisa mempengaruhi keputusan negara. Hal ini berlaku bila suatu negara sedang berusaha untuk memperoleh dukungan terhadap posisinya dalam resolusi

²⁴ Ibid. Hal. 184-185

perserikatan bangsa-bangsa, atau sedang berusaha untuk membuat negara lain mengakui suatu boikot ekonomi.

e. Penerapan kerangka berpikir pada penelitian

Dengan mengacu kepada kerangka Coplin ini, kebijakan politik luar negeri Pakistan disebabkan oleh tiga faktor yakni politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Dalam konteks internasional, hal yang memiliki keterkaitan langsung dengan konflik Houthi di Yaman adalah perang proxy Saudi-Iran dalam bidang Sunni-Syiah. Hal ini berdasarkan pertimbangan penulis jika Pakistan ikut melakukan serangan udara terhadap Houthi yang merupakan orang Syiah, maka hal ini akan mengakibatkan pihak-pihak tertentu menganggap bahwa Pakistan telah menegaskan posisinya di antara konflik Sunni-Syiah. Penegasan posisi Pakistan ini mungkin akan memberikan akibat yang tidak diinginkan oleh Pakistan.

Dalam membahas peran politik dalam negeri, Coplin menjabarkan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari hubungan yang kompleks antara policy influencers dengan para pengambil keputusan dalam sebuah sistem yang disebut dengan policy influence system. Maka dari itu dari penjelasan Coplin pertama-tama bisa ditetapkan adalah Pakistan merupakan negara yang menganut sistem politik terbuka. Dalam sistem terbuka Coplin berpendapat bahwa pengambil keputusan politik luar negeri dipaksa untuk berargumentasi di depan umum tentang kebijakan-kebijakannya.

Kemudian menurut penulis, karena harus berargumentasi di depan umum tadi, maka yang akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan di kasus ini adalah

penduduk Syiah di Pakistan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Houti adalah orang-orang Syiah. Bila pun kelompok Syiah di Pakistan adalah minoritas, mereka bisa saja mengakibatkan ketidakstabilan dalam negeri bagi Pakistan mengingat maraknya konflik sektarian di domestik Pakistan itu sendiri. Pada tahun 2007-2011, ada sekitar 631 insiden sektarian di Pakistan. Mayoritas insiden-insiden tersebut diakibatkan oleh Sunni dan Syiah. Jadi faktor politik dalam negeri di kerangka ini, menurut penulis, memiliki potensi memberikan ketidakstabilan dalam negeri karena penduduk Syiah mereka bisa saja kecewa dengan keputusan yang diambil sehingga memperparah konflik sektarian dalam negeri.

Pakistan merupakan negara yang memiliki GNP perkapita yang tergolong rendah yakni \$1.400,00.²⁵ Perekonomian Pakistan bergantung dengan berbagai macam impor untuk memenuhi keperluan produksi dan konsumsinya.²⁶ Neraca pembayaran Pakistan pada berdasarkan data tahun 2014 sebesar \$-3.544.000.000,00.²⁷ Meskipun demikian di bidang militer Pakistan cukup unggul yakni menempati urutan ke 17 berdasarkan ranking dari website globalfirepower.com dan berada pada peringkat ke 11 berdasarkan ranking [Business Insider](http://businessinsider.com).^{28 29}

²⁵ <http://data.worldbank.org/country/pakistan>

²⁶ http://www.gdn.int/admin/uploads/editor/files/Parallel%20Session%2022-%20Day%20III-Nasir_Pakistan's%20Imports%20Dependency.pdf

²⁷

<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=BN.CAB.XOKA.CD&period=#>

²⁸ <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp>

²⁹ http://www.businessinsider.co.id/these-are-the-worlds-20-strongest-militaries-ranked-2015-9/11/#.VvzyY_194_4

Berdasarkan beberapa ukuran ekonomi dan militer Pakistan di atas, bisa dikatakan bahwa Pakistan memiliki ‘kesiapan’ untuk membantu Arab Saudi melakukan serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman.

Berdasarkan hal-hal di atas, hal yang penulis nilai menyebabkan Pakistan menolak membantu serangan udara Arab Saudi adalah karena adanya komplikasi konflik Sunni-Syiah di domestik Pakistan dan Komplikasi konflik Saudi-Iran di konteks internasional.

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis:

Penyebab kebijakan Pakistan yang menolak untuk membantu serangan udara Arab Saudi terhadap Houthi adalah karena ada:

1. Komplikasi konflik Saudi-Iran di konteks internasional.
2. Komplikasi konflik Sunni-syiah di domestik Pakistan.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik studi pustaka. Sumber data bersifat literatur, yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan artikel serta menggunakan sumber-sumber artikel lain dan internet yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memberikan batasan-batasan. Penelitian akan dibatasi kepada data-data yang berkaitan dengan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Pakistan untuk menghadapi pemberontakan Houthi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab yang mana di antara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini akan menguraikan hubungan luar negeri Pakistan

BAB III

Bab ini akan menguraikan dinamika konflik Yaman serta implikasinya

BAB IV

Bab ini akan menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan Pakistan menolak membantu serangan udara Arab Saudi di Yaman

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya.